PERBEDAAN TINGKAT PENGEMBALIAN PINJAMAN PADA PROGRAM SPP DI KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG DAN BATANG ANAI

DETY LAFERA¹

Akademi Akuntansi Indonesia Padang

Email: detylafera20@gmail.com

PUGUH SETIAWAN²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: puguhstwn@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the differences in the rate of repayment of non-performing loans in Women's Savings and Loans (SPP) in Batang Anai District and 2x11 Enam Lingkungan District, Padang Pariaman Regency, West Sumatra Province. To measure the rate of return that is experiencing problems in the Women's Savings and Loans (SPP) activity is to use the Non Performing Loan (NPL) formula where NPL is a ratio to measure loan quality by using a comparison between non-performing loans and total loans. The amount of NPL that is currently allowed is a maximum of 5%. The Women's Savings and Loans Program (SPP) is working capital assistance for the poor in order to increase their economic productivity, where this SPP is the National Program for the Empowerment of Rural Independent Communities (PNPM MPd). The data analysis technique used is the *t*-test model (*t*-test) for the free *t* sample. The results of hypothesis testing by testing the Independent Samples Test show that for the NPL variable, it has a *t*-count value greater than the *t*-table of 1.8331. Besides, the significance level is 0,014 which is smaller than 0,05. This means that based on the NPL, there is a very significant difference in loan repayment rates between the SPP activities of Batang Anai District and 2x11 Enam Lingkungan District. This means that Batang Anai District has a worse rate of return than the 2x11 Enam Lingkungan District. An NPL that is too large indicates a lower ability of the UPK to control loans.

Key Words : Women Revolving Fund, Non Performing Loan, Activity Management Unit

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat pengembalian pinjaman bermasalah pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengukur tingkat pengembalian yang mengalami masalah pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah dengan menggunakan formula *Non Performing Loan* (NPL) dimana NPL adalah rasio untuk mengukur kualitas pinjaman dengan menggunakan perbandingan antara pinjaman bermasalah dengan total pinjaman yang diberikan. Besarnya NPL yang diperbolehkan saat ini adalah maksimal 5%. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah bantuan modal kerja bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya, dimana SPP ini merupakan Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd). Teknik analisa data yang digunakan yaitu Model Uji *t* (*t*-test) untuk *t* sample bebas. Hasil pengujian hipotesis dengan pengujian *Independent Samples Test* menunjukkan bahwa untuk variabel NPL, mempunyai nilai *t*-hitung yang lebih besar dari *t*-tabel sebesar 1,8331. Disamping itu tingkat signifikansinya 0,014 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti berdasarkan NPL, terdapat perbedaan tingkat pengembalian pinjaman yang sangat signifikan antara kegiatan SPP Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkungan. Artinya, Kecamatan Batang Anai memiliki tingkat pengembalian yang lebih buruk dibanding Kecamatan 2x11 Enam Lingkungan. NPL yang terlalu besar memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan UPK dalam mengendalikan pinjaman.

Kata Kunci : Simpan Pinjam Perempuan, Tunggalan Pinjaman, Unit Pengelola Kegiatan

1. PENDAHULUAN

Peranan pemerintah berkaitan dengan pengentasan kemiskinan terutama dalam penguatan modal usaha, memberikan bimbingan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan Indonesia saat ini.

Berdasarkan sumber data statistik pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 380.63 sebesar 67.19% berada pada daerah pedesaan. Sementara pada tahun 2014 jumlah masyarakat miskin sebanyak 733.94 sebesar 70.48% berada pada pedesaan. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 jumlah masyarakat miskin di Propinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 0.65% namun dari total jumlah masyarakat miskin tetap banyak terdapat pada daerah pedesaan yaitu sebesar 67,65%. Pada tahun 2016 jumlah masyarakat miskin tetap banyak

terdapat pada daerah pedesaan yaitu sebesar 68,12%. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat miskin pada Propinsi Sumatera Barat banyak terdapat pada daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan.

Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Agar penanggulangan kemiskinan efektif maka prinsip penyelenggaraan haruslah *as local as possible* yang mengupayakan semaksimal mungkin mengikut sertakan institusi lokal, sehingga penanganannya diharapkan akan lebih memiliki komitmen yang tinggi, konsisten dan berkelanjutan dalam program/kegiatan.

Salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah kegiatan Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) yaitu pemberian modal untuk pengembangan usaha atau peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Berdasarkan PTO alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.

Keberadaan program Simpan Pinjam Perempuan yang diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja terhadap usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Di samping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif.

Pada beberapa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, khususnya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) terjadi beberapa masalah yang timbul, antara lain: ketidaktepatan sasaran kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), sebagian masyarakat tidak menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha, bahkan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dalam pengelolaan dana pada Program Simpan Pinjam Perempuan, berdasarkan dari keterangan salah satu pengurus UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung mengatakan bahwa permasalahan yang kerap terjadi yaitu adanya tunggakan setoran yang hampir dialami sebagian besar kelompok ibu rumah tangga yang meminjam uang di PNPM Mandiri Pedesaan tersebut, bahkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini suatu keadaan dimana masyarakat sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Unit Pelaksana Kegiatan sesuai dengan perjanjian dimana ini membuat pelaksanaan program Simpan Pinjam Untuk Perempuan tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengevaluasi bagaimana perbedaan tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang diukur menggunakan kualitas pinjaman yang ditentukan oleh kolektibilitasnya, yaitu lancar tidaknya pembayaran bunga dan pokok pinjaman serta kemampuan masyarakat yang ditinjau dari keadaan usahanya dengan menggunakan formula *Non Performing Loan* (NPL).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Tujuan PNPM

Pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Berdasarkan buku Petunjuk Teknik Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan (2008) tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini dapat ditinjau secara umum dan khusus. Adapun tujuan PNPM secara umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2.2 Dasar Hukum PNPM Mandiri Pedesaan

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih rinci peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait sistem kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional
- b. Perpres No.54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang diketuai oleh Menkokesra dan bertugas untuk merumuskan langkah- langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. SK Menkokesra No.28 / Kep /Menko/ Kesra/XI/ Tahun 2006 yang diperbaharui dengan peraturan Kepmenko - Kesra No. 23 / KEP / Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri.

2.3 Pengertian (Simpan Pinjam Perempuan) SPP

Simpan pinjam perempuan (SPP) adalah salah satu program dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang memberikan pinjaman kepada perempuan yang termasuk dalam rumah tangga miskin

Dety Lafera- Puguh Setiawan- Tingkat Pengembalian Pinjaman Pada Program SPP Di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Dan Batang Anai

untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui usaha ekonomi produktif. Pengelolaan kegiatan SPP berada di bawah UPK, sedangkan UPK merupakan Unit Pengelola Kegiatan di wilayah Kecamatan yang didampingi oleh fasilitator Kecamatan. Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh UPK akan diajukan ketingkat Kecamatan dan Kabupaten, termasuk di dalamnya kegiatan SPP. Fasilitator Kecamatan berkewajiban melakukan verifikasi terhadap penggunaan dana operasional kegiatan (DOK) yang akan diajukan oleh UPK. Selanjutnya apabila pengajuan dana oleh UPK lulus pada tahap verifikasi maka dana tersebut akan dicairkan paling lama dalam jangka waktu 1 bulan setelah verifikasi. Pengajuan dana oleh UPK adalah berdasarkan kegiatan yang ada pada kelompok-kelompok yang ada di UPK tersebut. Kegiatan SPP yang telah berjalan tiap bulannya akan dilaporkan oleh kelompok kepada UPK, dimana laporan tersebut akan berguna untuk melihat perkembangan-perkembangan masing-masing kegiatan kelompok tersebut. Kegiatan SPP merupakan salah satu program dari PNPM Mandiri, yaitu berupa bantuan dana dari Pemerintah yang disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah atau BPMD (PTO PNPM-MP, Departemen Dalam Negeri RI, 2008).

2.4 Pengelolaan dan Besar Pinjaman SPP

Jasa pinjaman ditentukan sebesar 1 % per bulan tetap (*Flat Rate*) atau berdasarkan referensi bunga bank pasar untuk pinjaman dan disepakati besarnya di Forum MAN (Musyawarah Antar Nagari). Besaran jumlah pinjaman disesuaikan dengan kapasitas dana dan kredibilitas kelompok, dengan ketentuan jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya (naik 100%) dan jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat mengajukan jumlah pinjaman yang sama dengan pinjaman sebelumnya. Jangka waktu pinjaman untuk kelompok penyalur (*Channeling*) bisa 12 bulan dan maksimal 24 bulan dan jangka waktu pinjaman untuk kelompok pengelola (*Executing*), diatur secara khusus dan disesuaikan dengan mekanisme perguliran bagi kelompok *executing*.

2.5 Pengelolaan Pinjaman Bermasalah

Pengelolaan pinjaman bermasalah ditentukan berdasarkan kelancaran pembayaran kelompok kepada UPK. Pinjaman bermasalah disebabkan oleh berbagai sumber masalah dan memerlukan pola penanganan yang sesuai dengan permasalahan. Adapun tujuan pengelolaan pinjaman bermasalah adalah:

- Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir agar tetap memberikan manfaat kepada masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan,
- Menguatkan kelembagaan UPK dalam pengelolaan pinjaman,
- UPK mempunyai pola pengelolaan pinjaman bermasalah yang sesuai dengan kesepakatan lokal, transparan dan memberikan rasa keadilan, dan
- Meningkatkan kesadaran bahwa dana yang tertanam pada pinjaman bermasalah merupakan hak masyarakat dan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan

Permasalahan kelembagaan kelompok yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan kelompok peminjam sebagaimana mestinya, permasalahan keuangan kelompok baik yang disebabkan oleh permasalahan usaha/kegiatan itikad pada tingkat kelompok/pemanfaat sehingga mengakibatkan pengembalian ke UPK, permasalahan adanya penyelewengan dana dan permasalahan *force majeure*: permasalahan yang diakibatkan oleh bencana alam, huru-hara, perang dan kematian pemanfaat atau musibah karena kurangantisipasi resiko usaha (PTO PNPM-MP, Departemen Dalam Negeri RI, 2008).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan pada Kabupaten Padang Pariaman yang menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah jumlah total kecamatan dan Nagari yang ada pada Kabupaten Padang Pariaman.

Sampel merupakan bagian populasi yang terwakili dan akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang terwakili. (Gendro Wiyono, 2011). Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan tingkat jumlah pinjaman Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tidak dikembalikan pada Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Maka sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten PadangPariaman.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari Januari-Desember 2019.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menjelaskan cara-cara pengumpulan data kuantitatif yang akurat dan aktual serta berkaitan erat dengan masalah yang diteliti (Gendro Wiyono, 2011). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menganalisis dokumen dengan cara pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang akan digunakan untuk memperoleh data, analisis pengujian dan kesimpulan. Penelitian kuantitatif menurut (Gendro Wiyono, 2011) bertujuan untuk menguji atau memverifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif menjadi landasan dalam penentuan dan pemecahan masalah penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari pengambilan langsung pada kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Dan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Data-data tersebut berupa data jumlah kelompok dan jumlah pinjaman serta jumlah pengembalian pinjaman Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang digunakan sebagai ukuran tingkat pengembalian yang mengalami masalah pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara meminta data yang telah ada sebelumnya. Dokumentasi dikumpulkan terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian pada kantor Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengukuran masing-masing tingkat pengembalian pinjaman Program Simpan Pinjam (SPP) pada Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Alat ukur yang digunakan untuk melihat jumlah pinjaman yang mengalami masalah disini adalah NPL dimana NPL merupakan adalah rasio untuk mengukur kualitas kredit/pinjaman dengan menggunakan perbandingan antara kredit/pinjaman bermasalah dengan total kredit/pinjaman (Pandia, 2011)

Selanjutnya teknik analisa data yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat tingkat pengembalian pinjaman Program Simpan Pinjam (SPP) antara Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung menggunakan analisis data yang akan dilakukan meliputi: Model Uji t (*t-test*) untuk *t sample* bebas (Gendro Wiyono 2011). Uji t sample bebas digunakan untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok kasus, agar hasil penelitiannya baik, subjek yang diteliti harus dipilih secara random untuk kedua kelompok yang dibandingkan. Hal ini dilakukan jika ada perbedaan dalam jawaban dikarenakan oleh adanya perlakuan atau kurangnya perlakuan (*treatment*), bukan karena faktor lain. Untuk membandingkan rata-rata dua sampel kecil. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah kedua sampel mempunyai *varians* yang sama. Metode yang digunakan untuk menguji model ini adalah dengan menggunakan uji t. Untuk melakukan analisis signifikansi terhadap model digunakan berbagai pengujian statistik yaitu *T-test*.

Apabila hasil dari uji beda tidak terdapat perbedaan atau kedua varian sama (*Equal variances assumed*) maka kita akan menggunakan uji t-statistik dua arah dengan tingkat signifikansi 5%, dimana kriteria yang berlaku adalah:

Tabel 3.1
Perbandingan t-hit dan t-tab

Membandingkan t Hitung dengan t Tabel	Perbedaan Kinerja Antara Dua Variabel Dalam Dua kelompok
$t_{hit} > t_{tab}$ atau $t_{hit} < -t_{tab}$	→ signifikan
$t_{tab} < t_{hit} < t_{tab}$	→ insignifikan

Sumber : Gendro Wiyono (2011)

Dalam penelitian ini, untuk mengolah data digunakan program komputer *Microsoft Excel*, program statistik SPSS ver 16.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Normalitas Data

Sebelum pengujian hipotesis, perlu adanya pengujian asumsi dasar data atau uji normalitas data untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data diuji dengan uji satu sampel *Kolmogorov-smirnov*). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa untuk rasio NPL angka *Asymp Significantnya* > 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa distribusi data secara keseluruhan untuk keenam rasio tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas Data Sampel
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		BA	EL
N		9	9
Normal Parameters ^a	Mean	14.9533	3.9078
	Std. Deviation	1.05469E1	2.22779
Most Extreme Differences	Absolute	.236	.175
	Positive	.144	.139
	Negative	-.236	-.175
Kolmogorov-Smirnov Z		.708	.525
Asymp. Sig. (2-tailed)		.697	.946

a. Test distribution is Normal.

Sumber : output SPSS Versi 16 (2020)

Hasil uji normalitas data per kecamatan menunjukkan bahwa untuk nilai *Non Performing Loan* (NPL) angka *Asymp Significaninya* > 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa distribusi data untuk kesembilan tahun tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Pengujian Normalitas Data Per Kecamatan Pada Tahun 2008-2016.

No	Kecamatan	Nilai	Asymp sign	Critical Value	Kesimpulan
1.	Batang Anai (BA)		0.697	0.05	Normal
2.	2x11 Enam Lingkung (EL)	NPL	0.946	0.05	Normal

Sumber: Data sekunder yang diolah

4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk melihat karakteristik data, dimana dalam penelitian ini dengan menggunakan angka rata-rata dari masing-masing nilai NPL.

Tabel 4.3
Analisis Deskriptif NPL Kecamatan Batang Anai Tahun 2008 - 2016 (dlm %)

	Descriptive Statistics							
	N	Min	Max	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Sta	Sta	Sta	Sta	Std. Error	Sta	Sta
NPL	8	4.16	29.90	138.51	17.3138	3.01828	8.53698	72.880
Valid N (listwise)	8							

Sumber: Ringkasan Analisis Deskriptif NPL Kecamatan Batang Anai (2020)

Tabel analisis deskriptif pada Kecamatan Batang Anai Rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) selama 9 tahun sebesar 17,3%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPL selama tahun tersebut jauh diatas batas maksimum NPL yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Pada Kecamatan Batang Anai yang mempunyai nilai NPL terendah yaitu pada tahun 2009, dengan nilai sebesar 4,16%. Sedangkan nilai NPL tertinggi yaitu pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 29,97%. Rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) dari selama 9 tahun sebesar 17,3%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPL selama delapan tahun tersebut jauh diatas batas maksimum NPL yang disyaratkan oleh BI pada lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non bank yaitu sebesar 5%.

Deskripsi statistik Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Tahun 2008–2016 yang dipergunakan dalam analisis ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Analisis Deskriptif NPL Kec. 2X11 Enam Lingkung Tahun 2008 - 2016 (dlm %)

	Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Sta	Sta	Sta	Sta	Sta	Sta	Std. Error	Sta	Statistic
NPL	8	4.75	2.65	7.40	35.17	4.3962	.63422	1.79384	3.218
Valid N (listwise)	8								

Sumber: Ringkasan Analisis Deskriptif NPL Kecamatan 2x11 Enam Lingkung (2020)

Dari tabel analisis deskriptif pada Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, Rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) selama 9 tahun sebesar 4.39%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPL selama tahun tersebut berada dibawah batas maksimum NPL yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Pada Kecamatan 2x11 Enam Lingsung yang mempunyai nilai NPL terendah yaitu pada tahun 2014, dengan nilai sebesar 2,65%. Sedangkan nilai NPL tertinggi yaitu pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 7,40%. Rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) dari selama 9 tahun sebesar 4,3962%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPL selama delapan tahun tersebut berada dibawah batas maksimum NPL yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

4.3 Hasil Uji Beda

Hasil analisis statistik pada uji beda tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman memiliki sebanyak 18 sampel yang terdiri dari 9 sampel Kecamatan Batang Anai dan 9 sampel Kecamatan 2x11 Enam Lingsung dengan menggunakan uji beda dalam pembahasannya (*uji Independent Samples Test*). Analisis menunjukkan hasil uji beda t untuk beda rata-rata dua kelompok. Berdasarkan nilai t-hitung untuk kinerja masing-masing Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung atas variabel NPL atas 18 sampel penelitian terhadap masing-masing kecamatan. Besarnya nilai t dari tabel distribusi t untuk N = 18 dan $\alpha = 0,05$ untuk uji pada satu sisi dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ adalah 1,8331.

Berdasarkan hasil uji *Independent Samples Test* Perbedaan Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2008-2016 dilihat dari rasio NPL ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Hasil Uji Independent Samples Test NPL
Group Statistics

KECAMATAN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NPL BA	9	14.9533	10.54686	3.51562
EL	9	3.9078	2.22779	.74260

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means					95% Confidence Interval of the Difference	
		t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
NPL	Equal variances assumed	3.074	16	.007	11.04556	3.59319	3.42833	18.66278
	Equal variances not assumed	3.074	8.712	.014	11.04556	3.59319	2.87611	19.21500

Sumber : Ringkasan Output *Independent Samples Test* untuk NPL (2020)

Tabel diatas menunjukkan hasil uji beda t untuk sampel tidak berpasangan. Berdasarkan tabel ini nilai t hitung untuk nilai NPL adalah 3.074. Seperti telah diketahui bahwa nilai t dari tabel distribusi t untuk N = 9 dan $\alpha = 0,05$ untuk uji beda rata-rata dua kelompok adalah 1,8331. Karena hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa berdasarkan NPL, tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman sangat berbeda secara signifikan, maka nilai t tabel yang digunakan adalah 1,8331. Hasil pengujian hipotesis dengan pengujian *Independent Samples Test* menunjukkan bahwa untuk variabel NPL, mempunyai nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,8331. Disamping itu tingkat signifikansinya 0,014 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis null (Ho) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkat perbedaan yang sangat signifikan pengembalian pinjaman dana bergulir program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan NPL.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan table 4.6 bahwa adanya perbedaan NPL antara Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman ditunjukkan dari nilai *mean difference* NPL dari hasil *Independent Samples Test* antara Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman tersebut secara signifikan, di samping itu Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman tersebut memiliki angka rata-rata NPL tidak memenuhi ketentuan yang dinyatakan termasuk kedalam lembaga keuangan yang baik dimana harus memiliki NPL paling tinggi sebesar 5%.

Adanya perbedaan NPL antara Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman ditunjukkan dari nilai rata-rata NPL masing-masing kecamatan, dimana Kecamatan Batang Anai memiliki rata-rata NPL yang lebih tinggi dari Kecamatan 2x11 Enam Lingkung yaitu sebesar 14.9533 % pada Kecamatan Batang Anai dan pada Kecamatan 2x11 Enam Lingkung sebesar 3.074 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan 2x11 Enam Lingkung mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam mengolah dan menjalankan program SPP dan dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan PTO yang ada, baik ditinjau dari segi penetapan kelompok penerima bantuan langsung masyarakat maupun dalam pembinaan usaha serta dilakukannya pengawasan yang baik.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pada hasil analisis pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda t untuk sampel tidak berpasangan, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan Tingkat rasio NPL periode 2008-2016 menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Nilai NPL dari hasil *Independent sample t-test* antara Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan nilai signifikan dari t-hitung sebesar 3.074 lebih besar dari 0.05. Hasil pengujian hipotesis dengan pengujian *Independent sample t-test* menunjukkan bahwa untuk variabel NPL, mempunyai nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel sebesar 1.8331. Disamping itu tingkat signifikansinya 0,014 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti hipotesis null (H_0) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pengembalian pinjaman dana bergulir program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
2. Adanya perbedaan NPL antara Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman terlihat dari nilai rata-rata NPL antara Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman sebesar 14.9533 pada Kecamatan Batang Anai dan 3.9078 pada Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman .
3. Apabila memperhatikan nilai rata-rata NPL, Kecamatan Batang Anai memiliki tingkat pengembalian yang lebih buruk dibandingkan dengan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. NPL yang terlalu besar memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan UPK dalam mengendalikan pinjaman.

5.2 Keterbatasan

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih memperbesar sampel yaitu dengan melibatkan seluruh kecamatan dalam satu kabupaten, dengan demikian hasil penelitian dapat digeneralisir.
2. Penelitian ini dapat tidak bisa menjangkau aspek manajemen UPK dalam melakukan penilaian kredit/ pinjaman dan penilaian dari unsur kelompok masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperbandingkan seluruh kabupaten yang ada pada Sumatera Barat, dengan demikian hasil penelitian dapat digeneralisir.

5.3 Saran

Yulihardi (2015) melakukan penelitian Analisis Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program PNPM-MP dikecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitiannya membahas penyaluran dana bergulir simpan pinjam perempuan oleh Unit Pengelola Kegiatan kepada Kelompok dan menganalisa pengaruh penyaluran dana terhadap perubahan pendapatan. Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, dan untuk menyempurnakan penelitian berkaitan dengan kegiatan penyaluran dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP), maka penelitian mendatang perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih memperbesar sampel yaitu dengan melibatkan seluruh kecamatan dalam satu kabupaten, dengan demikian hasil penelitian dapat digeneralisir.
2. Diharapkan penelitian mendatang dapat menjangkau aspek manajemen UPK seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan penilaian kredit / pinjaman dan penilaian dari unsur kelompok masyarakat.
3. Jika memperhatikan nilai rata-rata NPL, Kecamatan Batang Anai memiliki tingkat pengembalian yang lebih buruk dibandingkan dengan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. NPL yang terlalu besar memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan UPK dalam mengendalikan pinjaman. Disini diharapkan UPK Kecamatan Batang Anai lebih memperhatikan proses awal dalam pencairan Dana Bergulir (SPP) dengan melakukan seleksi secara kolektif terhadap calon kelompok peminjam dalam arti kata calon kelompok peminjam ditentukan sesuai dengan PTO supaya dana lebih tepat sasaran kepada kelompok

- dan pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok betul-betul menggunakan dana tersebut untuk modal usaha.
4. Diharapkan unit Pelaksana Kegiatan (UPK) lebih meningkatkan pemantauan (*survey*) kelapangan, dan lebih ditingkatkan mengadakan pelatihan terhadap anggota kelompok mengenai pengembangan usaha dan sistem kewirausahaan, serta menekankan kepada anggota kelompok atas sanksi yang diberikan kepada anggota kelompok yang mengalami kemacetan atas pengembalian pinjaman baik itu sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai dengan ketentuan sanksi pinjaman bermasalah dengan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. *Penjelasan PTO (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Direktorat Jendral pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pandia, Frianto 2012. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta: Jakarta
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)* (Revisi 1998) tahun 2007
- Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang *Perkoperasian*
- UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang *Perkoperasian*
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*.
- Wiyono, Gendro (2011), *“Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS & SMART PLS”*, Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN: Yogyakarta
- Yulihardi (2015) *Analisis Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman*. Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.2 (145 - 159)